



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

MELIA AYU INDRIAWATI
NPM. 221003742019042

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Telah Dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Melia Ayu Indriawati

221003742019042

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hadi Karyono, S.H., M.HUM
NUPTK 7034742643130083

Anggota

Sumartini Dewi, S.H., M.HUM
NUPTK 1640744645230082

Anggota

Dr. Widayanti, S.E., S.H., M.H.
NUPTK 9059748649230153

Mengetahui
Dekan,



Dr. Edi Pranoto, S.H., M.HUM
NUPTK 9744743644130122

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan bentuk penggunaan kekuatan negara yang berimplikasi langsung pada pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan gas air mata oleh Kepolisian serta mengkaji proses pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia akibat penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan gas air mata telah diatur dalam kerangka penggunaan kekuatan yang bertahap, terbatas, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan gas air mata sebagai alat non-mematikan yang hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Pelanggaran terhadap prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian berpotensi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang bersifat berlapis, baik administratif, pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban negara dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme akuntabilitas dan pemulihan hak korban menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Gas Air Mata; Kepolisian; Unjuk Rasa; Hak Asasi Manusia; Pertanggungjawaban Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Pembatasan Masalah.....	17
C. Perumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum.....	22
1. Pengertian Umum Tentang Unjuk Rasa.....	22
2. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Demokrasi.....	23
3. Tugas dan Fungsi Kepolisian	25
4. Pengertian Umum Tentang Gas Air Mata.....	29
5. Teori Penggunaan Kekuatan Oleh Negara	30
B. Tinjauan Khusus	35
1. Pengaturan Hukum Penggunaan Gas Air Mata.....	35

2. Kesesuaian Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian	40
3. Dampak Penggunaan Gas Air Mata	43
4. Prosedur Penggunaan Gas Air Mata	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Penyajian Data.....	49
F. Metode Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa	52
B. Proses Pertanggungjawaban Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran HAM Atas Penggunaan Gas Air Mata	72
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96